

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profil kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik per September 2016 menunjukkan penurunan, yang semula 28,01 orang (10,86%) pada Maret 2016 menurun sebesar 0,25 juta pada September 2016 menjadi 27,76 juta orang (10,70%). Di Jawa yang merupakan pulau dengan penduduk terbanyak yang mendeskripsikan berbagai hal mengenai profil penduduk Indonesia, profil kemiskinan pada daerah perkotaan di Jawa menunjukkan 7,04 orang penduduk miskin (7,74%) dan pada daerah pedesaan sebanyak 7,79 orang penduduk miskin (13,94%). Bila ditotalkan penduduk miskin di Jawa sebanyak 14,84 juta orang (14,72%) angka tersebut menunjukkan bahwa setengah dari penduduk miskin di Indonesia berada di pulau ini.

Melihat komposisi penduduk miskin perkotaan dan pedesaan di Jawa hampir sama jumlahnya, menjadi pertanyaan ketika di daerah perkotaan, masyarakat yang cenderung lebih produktif dengan kesempatan terbuka masih banyak penduduk miskin yang memperjuangkan hidupnya di tengah kehidupan yang gemerlap dengan produktifitas dan mobilitas uang.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan krusial dalam ekonomi, disamping kelangkaan (*scarcity*), pertumbuhan (*growth*), pengangguran (*unemployment*), dan lainnya. Dampak yang diakibatkan kemiskinan pun berbagai macam dari mulai permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan sulit

bertumbuhnya perekonomian, bahkan kemiskinan juga menjadi salah satu faktor menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminal dan krisis moral lainnya.

Permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan selalu memunculkan respon dari setiap kalangan, empati akan sebuah permasalahan sosial tidak selalu dilakukan oleh pemerintah suatu negara akan tetapi semua orang yang tergerak hatinya sering kali ingin memberikan peran untuk ikut serta menyelesaikan masalah-masalah sosial, permasalahan-permasalahan ekonomi memicu respon setiap orang untuk bergerak ikut serta menata sebuah solusi isu-isu sosial dan membentuk kekuatan masyarakat secara kolektif yang mempunyai misi dermawan.

Kumpulan masyarakat ini sering dikatakan menjadi bagian ketiga dalam penataan pembangunan sebuah negara setelah Sektor Pemerintah dan Sektor Swasta, adapun yang belakangan ini disoroti oleh beberapa penelitian adalah mengenai lembaga-lembaga filantropi Islam, baik peran, manajemen, dan otoritasnya dalam mengorganisir dana-dana derma yang potensial. Lembaga ini dari tahun ke tahun terus memunculkan inovasi dan menggagas berbagai program penghimpunan hingga pendayagunaan dana filantropi tersebut.

Definisi filantropi berasal dari *Philanthropy*: *Philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Kemudian dalam konsep praktiknya filantropi adalah praktik memberi, melayani, dan asosiasi (perkumpulan) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Ditegaskan oleh Allien Shaw bahwa filantropi bukanlah sekedar karitas, akan tetapi lebih pada pendampingan yang bersifat pemberdayaan berdampak jangka panjang (Latief, 2010).

Sepuluh tahun terakhir peran lembaga filantropi Islam memang sedang berkembang meskipun perdebatan mengenai siapa yang berhak menghimpun dan mengalokasikan dana *Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf, dan Hibah* (ZISWAH) terus saja menyeruak, dapat dilihat dengan berbagai lembaga yang mulai muncul dan menawarkan berbagai kemudahan kepada para dermawan yang berbaik hati menyisihkan hartanya dan kemudian lembaga ini mampu untuk menyalurkan kepada golongan-golongan masyarakat yang berhak atas dana tersebut.

Pemerintah tidak serta merta mempunyai otoritas penuh atas dana dermawan ini baik dalam menghimpun dan mengalokasikan, sehingga muncul berbagai macam lembaga-lembaga filantropi atas dasar dan latar belakang yang berbeda tetapi mempunyai keresahan dan esensi tujuan yang sama yaitu perlunya lembaga yang mampu menghimpun dan mengalokasikan dana dermawan sehingga dapat tersalurkan untuk membantu golongan-golongan yang memang sebenarnya layak dan membutuhkan dana tersebut.

Potensi dana yang dihimpun lembaga filantropi Islam ini dapat dikaitkan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang menjadi mayoritas, kewajiban membayar zakat dan anjuran agama untuk saling berbagi terhadap sesama menjadi pemicu psikologis terhadap umat yang kemudian ingin berbagi kepada sesama, akhirnya para *muzakki* (pembayar zakat) yang akan memberikan dana dermanya membutuhkan Amil.

Melihat kembali tentang otoritas lembaga yang berhak mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana ini tidak dibatasi secara normatif, maka ormas-ormas Islam di Indonesia pun berhak berperan dalam hal ini sehingga banyak lembaga

filantropi Islam muncul sebagai representasi peran ormas-ormas Islam di bidang filantropi. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah, pun memunculkan lembaga filantropi yang independen dengan nama Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU), sejak awal dibentuk, lembaga ini terus memupuk kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan bahwa lembaga ini kredibel dalam menghimpun dan menyalurkan dana derma sesuai akad-akad fikih Islam, hingga saat ini dengan model penyaluran dana *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS) yang disertai program pendampingan sebagai model pemberdayaan, LAZISMU terus berinovasi dalam program-program pendayagunaan dana filantropi Islam.

Penyerapan dana derma oleh lembaga zakat ini sangat potensial, dapat dideskripsikan dengan mendata berbagai macam kegiatan Muhammadiyah lain kemudian pada kegiatan atau aktifitas tersebut terdapat potensi zakat atau dana filantropi lain yang kemungkinan bisa dihimpun oleh LAZISMU. Sebagai salah satu contoh adalah potensi filantropi yang mungkin dapat diperoleh dari kegiatan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Adapun lembaga-lembaga yang termasuk AUM adalah, Sekolah, dan Rumah Sakit. Jika saja AUM menyerahkan kewajiban zakat dan atau dana filantropi lain kepada LAZISMU, maka akan menjadi potensi penting karena dengan jumlah AUM yang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah menjadikan potensi dana filantropi Islam yang mungkin dihimpun oleh LAZISMU. Berikut adalah daftar AUM sesuai jenis dan potensi dana filantropi Islam yang mampu dihimpun oleh LAZISMU:

Tabel 1.1
Potensi Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah
11 Kota di Indonesia Tahun 2015¹

Besaran Dana Filantropi		Perguruan Tinggi			Potensi Dana Filantropi (Rp)
Kelompok Dana	Rata-rata (Rp)	Total	%	Jumlah PT	
<50 juta	40.000.000	172	59	101	4.059.200.000
50 juta – 100 juta	80.000.000		14	24	1.926.400.000
100 juta – 250 juta	230.000.000		4	7	1.582.400.000
250 juta – 500 juta	450.000.000		9	16	7.200.000.000
500 juta – 1 Milyar	750.000.000		-	-	
>1 Milyar	1.200.000.000		14	24	28.896.000.000
Total dan Filantropi					43.664.000.000
Besaran Dana Filantropi		Rumah Sakit			Potensi Dana Filantropi (Rp)
Kelompok Dana	Rata-rata (Rp)	Total	%	Jumlah Rumah Sakit	
<50 Juta	40.000.000	457	77	352	14.075.600.000
50 – 100 juta	80.000.000		15	68	5.440.000.000
100 – 250 juta	230.000.000		-	-	-
250 – 500 juta	450.000.000		8	37	16.452.000.000
500 juta – 1 Milyat	750.000.000		-	-	-
>1 Milyar	1.200.000.000		-	-	-
Total dana Filantropi					35.967.600.000
Besaran Dana Filantropi		Sekolahan			Potensi Dana Filantropi (Rp)
Kelompok Dana	Rata-rata (Rp)	Total	%	Jumlah Sekolah	
<50 juta	10.000.000	2915	53	1545	15.450.000.000
50 – 100 juta	60.000.000		18	525	31.500.000.000
100 – 250 juta	200.000.000		23	670	134.000.000.000
250 – 500 juta	450.000.000		-	-	-
500 juta – 1 Milyar	600.000.000		6	175	105.000.000.000
>1 Milyar	1.5000.000.000		-	-	-
Total Dana Filantropi					285.950.000.000
<i>Tiga ratus enam puluh lima milyar limaratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah/per tahun</i>					365.581.600.000
Potensi Seluruh AUM					

Sumber: LAZISMU, EPI UMY, LP3M UMY (2015)

¹ Penelitian laporan survei potensi dana filantropi Islam yang mampu dihimpun oleh LAZISMU dengan mengambil sampel di 11 kota di Indonesia antara lain: Pekanbaru, Padang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Surakarta, Surabaya, Mataram, Makassar, Balikpapan, dan Pontianak pada tahun 2015 dilakukan oleh LAZISMU, EPI UMY dan LP3M UMY.

Menurut data survei di 11 kota besar di Indonesia yang ada pada penelitian lain, perolehan dana derma menurut identitas para muzakki atau donatur masih didominasi oleh warga Muhammadiyah, per 2015 saja presentase jumlah donatur yang merupakan warga Muhammadiyah senilai 94% dari keseluruhan dan 6% dari non warga Muhammadiyah. Bila dilihat disparitasnya memang terkesan jauh tapi apabila dilihat secara komposisi, perolehan dana ZIS didapat dari berbagai macam kalangan dan instansi, berikut merupakan potensi dana filantropi yang diperoleh oleh LAZISMU per 2015 berdasarkan komposisi perolehan dana ZIS. Terlihat dari data tersebut indikasi yang terjadi adalah bahwa perolehan dana ZIS yang diterima oleh LAZISMU masih didominasi oleh warga Muhammadiyah sendiri juga termasuk AUM, akan tetapi perolehan dari non-warga Muhammadiyah sudah mulai terlihat maka indikasi yang terlihat bahwa LAZISMU mulai mendapat kepercayaan dari berbagai kelompok masyarakat.

Tabel 1.2
Potensi Filantropi Warga Muhammadiyah
11 Kota di Indonesia Tahun 2015²

Kelompok Pendapatan perbulan Warga	Estimasi Warga Muhammadiyah			Total Potensi (Rp)
	Total (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	
Kurang dari 3.000.000		30.8	9240	1.011.780.000
3.000.000 – 6.000.000		52.1	15630	2.422.650.000
6.000.000 – 12.000.000		14.1	4230	9.425.497.500
12.000.000 – 15.000.000		1.2	360	180.000.000
Diatas 15.000.000		1.8	540	228.690.000
	Potensi Dana Filantropi perbulan			13.268.617.500
	Potensi Dana Filantropi pertahun			159.223.410.00

Sumber: LAZISMU, EPI UMY, LP3M UMY (2015)

² *ibid*

Dalam survei yang sama pada akhir laporannya disimpulkan potensi keseluruhan yang sebelumnya telah dikelompokan antara Potensi dari Warga Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah yang sebenarnya potensinya sangat besar dan bisa disinergikan dengan LAZISMU, perolehan pertahun apabila kedua potensi itu dijumlahkan mencapai nilai 500 miliar rupiah, sebuah angka yang sangat besar.

Lembaga Filantropi kebanyakan masih belum mendistribusikan dana derma yang diperoleh untuk sektor sosial ekonomi, antara lain yang paling sering ditemui adalah untuk bidang pendidikan meskipun bermanfaat dan mendukung hak untuk memperoleh pendidikan yang layak akan tetapi efek dari perputaran uangnya terlalu jauh dan bersifat *intervening* terhadap tujuan produktifitas dana derma yang dikelola. Kemudian untuk menyantuni secara tunai orang-orang yang masih dibawah garis kemiskinan sehingga produktifitas dari dana tersebut sama saja tersendat karena uang yang diterima akan bersifat *disposable income*, hal tersebut tidak disalahkan akan tetapi masih ada cara untuk menolong dengan tidak “sekedar” menyantuni, antara lain dengan program-program tambahan modal berbasis produktif yang disertai pendidikan dan berbagai metode advokasi.

Islam memandang bahwa uang memiliki sifat sesuatu yang mesti dialirkan (*flow concept*) artinya bukan menyatakan bahwa uang adalah milik hak semua orang akan tetapi uang mesti disalurkan kepada 8 *ashnaf* yang lebih membutuhkan dana berlebih untuk dikelola pada kegiatan produktif. Menurut ilmuan barat Irving Fisher mengemukakan mengenai konsep percepatan uang, menurutnya uang

memiliki sifat *flow concept* sama halnya seperti apa yang menjadi pengembangan doktrin ekonomi Islam tentang eksplorasi sifat uang tersebut.

Sistem distribusi zakat yang merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat, dapat dikategorikan kepada dua; secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti zakat dialokasikan langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara konsumtif atau tidak dikembangkan agar mendapatkan produktifitas dari dana ZIS tersebut. Sementara harta zakat yang didistribusikan secara produktif berarti mustahik tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi (*disposable income*) tetapi harus diusahakan terlebih dahulu digunakan untuk sektor riil, baik oleh mustahik sendiri maupun oleh lembaga amil (Mubasirun, 2013).

Mengingat tujuan ZIS ini bukan hanya dijadikan sebagai *disposable income* bagi penerimanya maka LAZISMU dan beberapa lembaga filantropi Islam mengkonversinya menjadi program-program pemberdayaan masyarakat beserta advokasinya untuk menjadikan dana ZIS lebih produktif dan tidak langsung habis yang minim manfaat ketika disalurkan. Maka, dari tahun ke tahun program pemberdayaan semakin kreatif dan lebih esensial terhadap tujuan disalurkannya dana ZIS itu sendiri, yaitu untuk kepentingan produktif agar masyarakat terbebas dari jeratan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai upaya membantu masyarakat dalam mengembangkan kapasitas diri sehingga mampu untuk mengatasi masalah dan menentukan keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat secara umum bertujuan untuk terciptanya kekuatan dan

kemampuan lembaga masyarakat agar secara mandiri mampu mengelola dirinya berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut serta mampu menghadapi tantangan persoalan di masa yang akan datang (Abidin, 2013).

Adapun program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZISMU adalah:

a) Pertanian atau Tani Bangkit, b) *Sosial Micro Finance*, c) YES Program, d) Perempuan Berdaya. Keempat program pemberdayaan ekonomi tersebut diaplikasikan sesuai dengan potensi lingkungan target pemberdayaan itu sendiri yang telah ditinjau sebelumnya oleh amil yang mempunyai peran advokasi, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan harapan bahwa program akan dapat berjalan tepat sasaran dan pencapaian hasil yang diharapkan dapat maksimal.

Cabang LAZISMU sendiri sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan fasilitas dalam menghimpun dari para muzakki dan mengalokasikan dana ZIS di berbagai daerah tersebut, terutama di daerah yang mempunyai potensi serta menjadi basis gerakan Muhammadiyah karena memang LAZISMU adalah lembaga filantropi Islam yang berafiliasi dengan Muhammadiyah sehingga Warga Muhammadiyah menaruh kepercayaan atas dana derma mereka cenderung kepada LAZISMU. Salah satu daerah basis gerakan Muhammadiyah yang mempunyai potensi penyerapan dana ZIS tinggi adalah Yogyakarta, potensi khusus LAZISMU sangat terlihat di Yogyakarta karena menjadi salah satu basis terbesar Muhammadiyah, mengingat potensi utama LAZISMU adalah menghimpun terlebih dahulu dari Warga Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). AUM di Yogyakarta jauh lebih maju

dibandingkan dengan AUM di daerah-daerah lain, warga Muhammadiyah yang populasinya cukup banyak di Yogyakarta semakin memperlihatkan potensi perolehan dana filantropi yang dihimpun oleh LAZISMU.

Sistem desentralisasi yang diterapkan di Yogyakarta, pada tingkat Pimpinan Ranting/Cabang Muhammadiyah (PRM/PCM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) terdapat amil zakat bentukan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) untuk *concern* memberikan bekal pemberdayaan kepada mustahik di daerah sekitar. Hal ini menjadikan dana bergulir yang diberikan ke masyarakat selain mudah untuk diawasi juga memperlihatkan LAZISMU sebagai amil yang memiliki konsep pemberdayaan yang profesional dan juga memberikan perhatian yang maksimal dalam program pemberdayaan dana filantropi.

LAZISMU PDM Sleman merupakan salah satu contoh lembaga filantropi Islam yang memberikan dampingan dalam pemberdayaan mustahik, sebagai contoh adalah PCM Sleman, dana ZIS yang telah terhimpun oleh LAZISMU sebagian dialokasikan untuk program pemberdayaan mustahik dalam pengembangan di bidang peternakan, alokasi dana produktif diberikan kepada beberapa peserta yang akan beternak kambing, sepasang kambing diberikan kepada peserta program kemudian akan dirawat dan ditenak oleh peserta sampai peserta mampu mengembangkan peternakan kambing secara mandiri, setelah peserta dirasa mampu untuk mandiri maka peserta harus mengembalikan senilai dengan sepasang kambing yang diberikan oleh LAZISMU sebagai modal dan apabila setelah mandiri peserta merasa kesulitan kembali dalam usaha peternakan tersebut, maka

LAZISMU akan membantu kembali dari segi pemberian ternak sebagai modal dan peserta mempunyai hak atas hal tersebut.

Temuan dari salah satu penelitian (Kholis., dkk., 2014) dengan studi kasus 16 BAZ maupun LAZ di Yogyakarta, bahwa setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta melaksanakan standar organisasi internal, strategi *fundraising*, pengelolaan dan penyaluran, dan pola pengawasan dan transparansi dengan mekanisme yang berbeda dan kapasitas masing-masing lembaga. Pada umumnya BAZ dan LAZ yang berafiliasi dengan suatu lembaga cenderung mengandalkan pada pemotongan gaji dalam penghimpunaan dana zakat, sedangkan LAZ yang lebih independen cenderung mengkreasikan program dan akuntabilitas untuk menarik minat muzakki. Sedangkan untuk manajemen pendistribusian dan pendayagunaan, BAZ maupun LAZ mendistribusikan dana zakat untuk fakir miskin, beasiswa peralajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif dan pinjaman *qardul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen.

Penelitian tersebut mengindikasikan banyak hal mulai dari bagaimana pendistribusian zakat melalui salah satu model pemberdayaan ekonomi Islam dan dampak yang mampu dihasilkan dari tambahan modal sosial berbasis filantropi Islam. Dengan berbagai model pemberdayaan yang berbeda maka akan banyak analisis yang mampu dikembangkan karena model yang berbeda menentukan prinsip ekonomi Islam yang perlu dikaji dalam penerapannya di masyarakat dan dampak-dampak yang mampu diberikan.

Atas beberapa dasar tersebut perlu diteliti kegiatan filantropi yang kini sangat berkembang dengan berbagai inovasi konsep pendayagunaannya terutama mengenai distribusi dana filantropi tersebut di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengingat tingkat potensi dana filantropi Islam yang besar maka penulis tertarik untuk mengangkat tema “**Analisis Pemberdayaan Dana Filantropi Islam Pada Bidang Sosial Ekonomi Oleh LAZISMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman**”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Untuk menjadikan penelitian ini lebih fokus terhadap studi kasus dan analisis maka pembahasannya akan dibatasi. Adapun beberapa hal yang akan dianalisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Evaluasi Program Pemberdayaan di Bidang Sosial Ekonomi yang dilakukan LAZISMU PDM Sleman. Dalam mengevaluasi penulis mencari tahu apa saja Indikator-indikator Pemberdayaan Ekonomi yang telah dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman.
2. Mengukur kemanfaatan program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman, dengan mencari tahu tujuan program pemberdayaan yang sudah tercapai dan dirasakan oleh mustahik.
3. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi pada mustahik setelah menerima dana filantropi Islam dari LAZISMU PDM Sleman dengan membandingkan pendapatan sebelum dengan pendapatan sesudah mengikuti program pemberdayaan ekonomi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa konteks pembahsan yang perlu diungkapkan dalam penelitian ini:

1. Apakah program pemberdayaan di bidang sosial ekonomi berbasis dana filantropi Islam yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman sudah memenuhi indikator-indikator proses pemberdayaan?
2. Apakah program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis dana filantropi Islam yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman sudah memberikan kemanfaatan sesuai dengan tujuan?
3. Apakah program pemberdayaan di bidang sosial ekonomi berbasis dana filantropi Islam yang dilakukan LAZISMU PDM Sleman memberikan dampak positif terhadap perubahan kondisi perekonomian Mustahik?

D. Tujuan Penelitian

Dari adanya pembatasan dan perumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai capaian yang diharapkan dalam pembahasannya, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis indikator-indikator proses pemberdayaan pada program pemberdayaan di bidang sosial ekonomi berbasis dana filantropi Islam yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman.
2. Menganalisis kemanfaatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis dana filantropi Islam yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman sesuai dengan tujuan.

3. Mengetahui dampak program pemberdayaan di bidang sosial ekonomi berbasis dana filantropi Islam yang dilakukan LAZISMU PDM Sleman terhadap perubahan kondisi perekonomian Mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praksis pada nantinya yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai ekonomi Islam yang perlu kontribusi banyak dari para pelajar, ilmuan, dan praktisi untuk memberikan cakrawala yang terus terbaharui mengenai Islamisasi ekonomi sehingga dapat terbentuk doktrin ekonomi Islam secara eksplisit dan aktual.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan perhitungan dalam pengembangan program pemberdayaan dana filantropi Islam serta pendampingan kepada masyarakat di bidang sosial ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU PWM D.I Yogyakarta dan menjadi pembelajaran bagi lembaga-lembaga filantropi lainnya.